

**IMPLEMENTASI PENGALIHAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

SKRIPSI

Oleh

AUDI KRISTANTO

NIM : 06051281621021

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

**IMPLEMENTASI PENGALIHAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

SKRIPSI

Oleh

AUDI KRISTANTO

NIM : 06051281621021

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2021

**IMPLEMENTASI PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

SKRIPSI

Oleh

Audi Kristanto

Nomor Induk Mahasiswa 06051281621021

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan,

Pembimbing I

Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

NIP. 196312211989112001

Pembimbing II

Drs. Emil El Faisal, M.Si.

NIP.196812211994121001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn,

Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198707042015041002



**IMPLEMENTASI PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

SKRIPSI

Oleh

Audi Kristanto

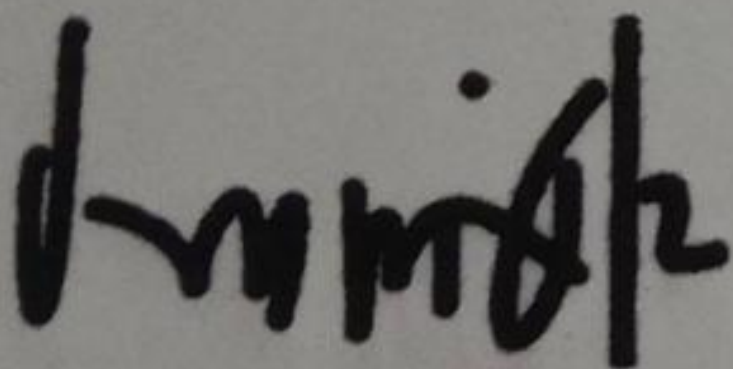
Nomor Induk Mahasiswa 06051281621021

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diajukan dan lulus pada :

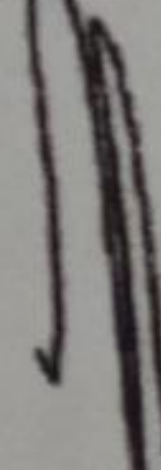
Hari/ Tanggal : Sabtu, 23 Oktober 2021

Pembimbing I



**Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
NIP. 196312211989112001**

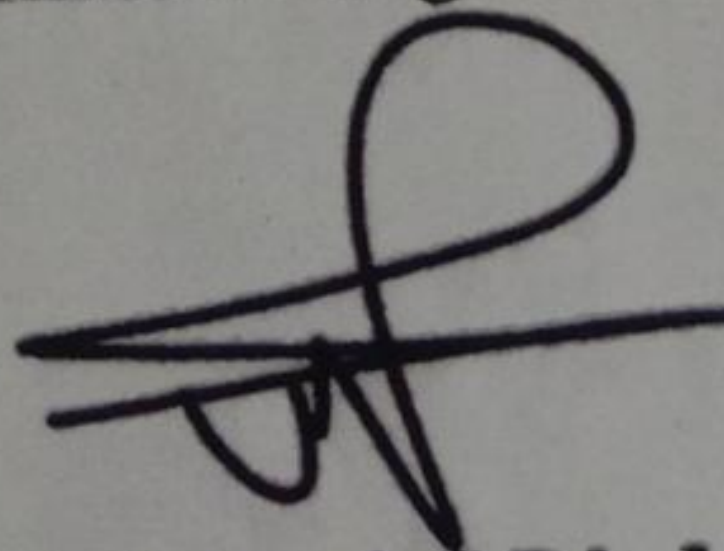
Pembimbing II



**Drs. Emil El Faisal, M.Si.
NIP.196812211994121001**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn,



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Audi Kristanto

NIM : 06051281621021

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Banyuasin)." ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Audi Kristanto

NIM. 06051281621021

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D. dan Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si. sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa merahmati dan membalas kebaikan mereka. Aamiin

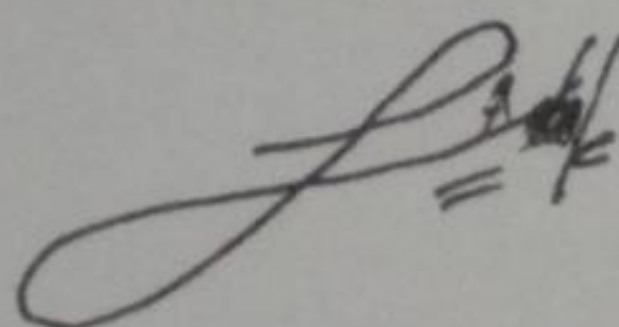
Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hartono, M.A selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd.,M.Pd., selaku Koordinator Program Studi PPKn yang telah membantu dan memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Bapak Emil El Faisal, M.Si., Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Sulkipani S.Pd.,M.Pd., Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Amin

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala UPT SMAN 6,9,12 Musi Banyuasin, Kepala SMA Rahmaniyyah Sekayu serta Kepala UPT SMKN 1,4,8 Musi Banyuasin yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Indralaya, Oktober 2021

Penulis,



Audi Kristanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah.....	5
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	5
2.1.2 Sumber dan cara memperoleh kewenangan.....	6
2.1.3 Kebijakan Publik.....	7
2.2 Implementasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah.....	8
2.2.1 Pengelolaan Pendidikan.....	8
2.2.2 Pemerintah Provinsi.....	10
2.2.3 Pemerintah Kabupaten/Kota.....	12
2.3 Kerangka Berpikir.....	16
2.4 Alur Penelitian.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	18
3.1 Metode Penelitian.....	18
3.2 Variabel Penelitian.....	18
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	19

3.4 Populasi dan Sampel	20
3.4.1 Populasi	20
3.4.2 Sampel	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data	22
3.5.1 Teknik Dokumentasi	23
3.5.2 Teknik Wawancara	23
3.5.3 Teknik Observasi	24
3.6 Uji Keabsahan Data Kualitatif	25
3.6.1 Uji Kredibilitas	25
3.6.2 Uji Tranferabilitas	25
3.6.3 Uji Depandabilitas	26
3.6.4 Uji Konfirmabilitas	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.7.1 Reduksi Data	27
3.7.2 Penyajian Data	38
3.7.3 Pengambilan Kesimpulan	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	30
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	31
4.1.1.1 Profil Sekolah	31
4.1.1.1.1 UPT SMAN 6 Musi Banyuasin	31
4.1.1.1.2 UPT SMAN 9 Musi Banyuasin	32
4.1.1.1.3 UPT SMAN 12 Musi Banyuasin	33
4.1.1.1.4 SMA Rahmadiyah Sekayu	34
4.1.1.1.5 UPT SMKN 1 Musi Banyuasin	35
4.1.1.1.6 UPT SMKN 4 Musi Banyuasin	35
4.1.1.1.7 UPT SMKN 8 Musi Banyuasin	36
4.1.1.2 Struktur Organisasi Sekolah	37
4.1.1.3 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37
4.1.1.4 Jumlah Siswa Sekolah	38
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara	39

4.1.3 Deskripsi Data Hasil Observasi	48
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian	48
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	48
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	50
4.2.2.1 Triangulasi.....	54
4.2.2.2 <i>Membercheck</i>	55
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi	57
4.3 Reduksi Data	58
4.4 Penyajian Data.....	58
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran	62
5.2.1 Bagi Pemerintah.....	62
5.2.2 Bagi Mahasiswa	63
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Variabel Dalam Penelitian.....	19
Tabel 3.2 Jumlah Pendidikan Menengah di Kabupaten Musi Banyuasin.....	21
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	22
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	31
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Sekolah.....	37
Tabel 4.3 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	38
Tabel 4.4 Jumlah Siswa Sekolah.....	38
Tabel 4.5 Daftar Nama Informan.....	39
Tabel 4.6 Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Jumlah Siswa.....	49
Tabel 4.7 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara.....	50
Tabel 4.8 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Sesuai Indikator.....	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.3 Kerangka Berpikir.....	16
Bagan 2.4 Alur Penelitian	17

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Pengesahan Judul oleh Koordinasi Prodi
- Lampiran 4 : Kesiediaan Pembimbing 1 dan Pembimbing 2
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Keterangan Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 7 : Rubrik Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan telah Melaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKIP Unsri
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 11 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian di UPT SMAN 6 Musi
Banyuasin
- Lampiran 12 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian di UPT SMAN 9 Musi
Banyuasin
- Lampiran 13 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian di UPT SMAN 12 Musi
Banyuasin
- Lampiran 14 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian di SMAS Rahmaniyyah
Sekayu
- Lampiran 15 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian di UPT SMKN 1 Musi
Banyuasin
- Lampiran 16 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian di UPT SMKN 4 Musi
Banyuasin
- Lampiran 17 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian di UPT SMKN 8 Musi
Banyuasin
- Lampiran 18 : Surat Keterangan Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 19 : Rubrik Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 20 : Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 21 : Surat Keterangan telah melaksanakan Seminar Hasil Penelitian

- Lampiran 22 : Surat Keterangan Persetujuan Ujian Akhir Program Studi
- Lampiran 23 : Rubrik Perbaikan Ujian Akhir Program Studi
- Lampiran 24 : Surat Keterangan telah melaksanakan UAP
- Lampiran 25 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 26 : Kisi-kisi Wawancara
- Lampiran 27 : Lembar Wawancara
- Lampiran 28 : Kisi-kisi Observasi
- Lampiran 29 : Lembar Observasi
- Lampiran 30 : Hasil Dokumentasi Saat Penelitian
- Lampiran 31 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

Implementasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari
Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Di
Kabupaten Musi Banyuasin)

Oleh

Audi Kristanto

Pembimbing 1 : Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

Pembimbing 2 : Drs. Emil El Faisal, M.Si

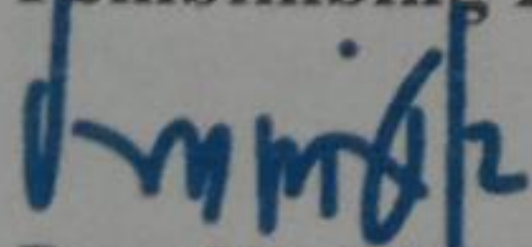
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi (studi kasus di kabupaten Musi Banyuasin). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan indikator yang menjadi dasar penelitian ini yaitu akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi (studi kasus di kabupaten Musi Banyuasin) saat ini belum efektif mengingat masih ada kendala berupa dampak yang harus dibenahi. Dampak positifnya yaitu terjadinya pemangkasan jalur birokrasi, sekolah dapat berkomunikasi dengan sekolah menengah atas lintas kabupaten namun tetap satu provinsi sehingga sekolah dapat berinovasi, dampak negatifnya yaitu kurangnya kesejahteraan guru honorer, kurangnya bantuan atas sekolah disebabkan banyaknya sekolah pendidikan menengah yang berada dibawah naungan pemerintah provinsi, serta jauhnya jarak yang harus ditempuh saat akan ke dinas pendidikan provinsi.

Kata Kunci : Pengalihan Kewenangan, Pengelolaan Pendidikan, Pendidikan Menengah.

Pembimbing I,



Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

NIP.196312211989112001

Pembimbing II,

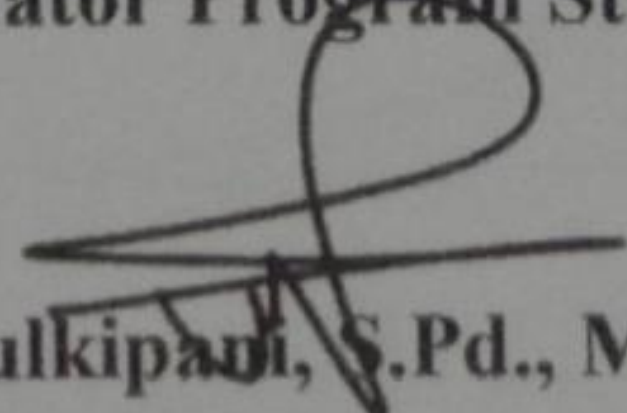


Drs. Emil El Faisal, M.Si

NIP. 196812211994121001

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn,



Sulkipadi, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

*The Implementation Of The Transfer Of Secondary Education Management
Authority Of District / City Government To The Provincial Government
(Case Study In Musi Banyuasin District)*

By

Audi Kristanto

Advisor 1: Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

Advisor 2 : Drs. Emil El Faisal, M.Si

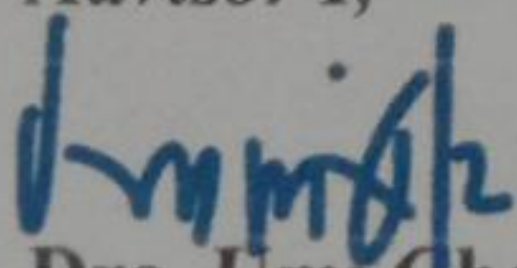
Study Program : Pancasila and Civic Education

ABSTRACT

This study aimed to determine the implementation of the transfer of secondary education management authority of district / city government to the provincial government (case study in Musi Banyuasin district). The research uses a qualitative approach with a case study method. The sampling technique used purposive sampling technique with 7 informants. Data collection techniques using documentation, interviews, and observations. The data validity test includes the credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the analysis of the data and indicators that form the basis of this research, namely accountability, efficiency, externalities, and national strategic interests, it is concluded that the transfer of authority to manage secondary education from the district/city government to the provincial government (a case study in Musi Banyuasin district) is currently not effective considering that there are still obstacles in the form of impacts that must be addressed. The positive impact is the reduction of bureaucratic lines, schools can communicate with high schools across districts but remain in one province so that schools can innovate, the negative impact is the lack of welfare for honorary teachers, lack of assistance to schools due to the large number of secondary education schools under the auspices of the provincial government, and the distance that must be covered when going to the provincial education office.

Keywords : *transfer of authority, education management, secondary education.*

Advisor I,



Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

NIP.196312211989112001

Advisor II,

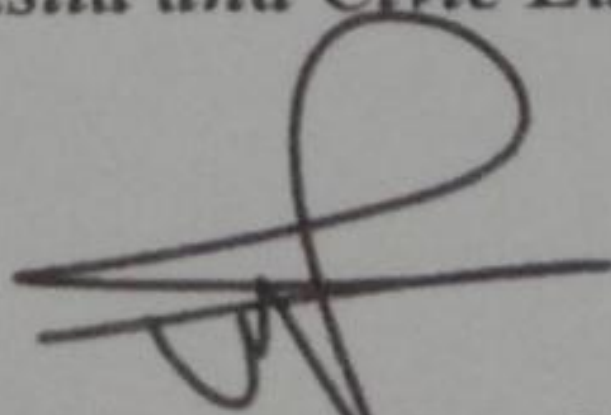


Drs. Emil El Faisal, M.Si

NIP. 196812211994121001

Approve of

Coordinator of Pancasila and Civic Education Study Program



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan hak dari setiap warga negara, salah satu dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dipertegas dalam Pasal 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa

“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sendiri terbagi lagi menjadi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masing – masing daerah memiliki pemerintahannya sendiri.”

Dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah daerah bersumber pada otonomi daerah dimana dalam Pasal 1 ayat 6 UU No.23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam konstruksi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan atas tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan. Pada asas Desentralisasi terdapat pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam urusan tertentu. Dalam asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Asas pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat yang berada didaerah tersebut.

Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang

sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang merupakan dasar dari dilaksakannya otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasca diterapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi perubahan yang cukup signifikan terutama di bidang pendidikan yang mana terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintahan provinsi. Kebijakan tersebut terdapat pada pasal 9 yang kemudian didalam lampiran UU tersebut dijelaskan hal-hal apa saja yang mengalami perubahan. Berkaitan dengan kebijakan tersebut maka terjadi perubahan juga pada administrasi pendidikan menengah.

Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari adanya desentralisasi pendidikan yang tujuannya agar memudahkan menyeragamkan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan menengah, dan juga pengalihan tersebut dilaksanakan agar pemerintah daerah kabupaten untuk fokus mengurus pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini,

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Habibi (2017) dalam penelitian dengan judul "Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten" mengatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki tugas yang cukup berat salah satunya adalah membuat serta memberikan kualitas pelayanan pendidikan yang berkualitas ataupun minimal sama dengan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah hal ini dikarenakan ruang lingkup yang dikelola pemerintah provinsi lebih luas dari pada pemerintah kabupaten.

Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sella Nova Damayanti (2017) dalam penelitian dengan judul "Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" bahwa perspektif pengelolaan pendidikan

menengah didasarkan sebagian pemangku kepentingan yang terlibat bahwa kurangnya peluang dalam penerapan kebijakan pasca pengalihan kewenangan tersebut, mereka merasa keberatan atas pangalihan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi.

Namun dalam penerapan atau implementasinya kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat, guru dan tenaga pendidik. Dari kalangan masyarakat khususnya orang tua peserta didik, dampak yang mereka rasakan saat ini adalah pembayaran uang iuran bantuan komite yang sebelumnya tidak ada namun saat ini dibebankan kepada mereka, karena pemerintah kabupaten sudah tidak lagi memberikan subsidi. Penerapan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi cukup berat bagi sekolah sekolah yang berada di daerah terpencil dan daerah yang berada pada perbatasan provinsi, dimana jarak antara sekolah dengan ibukota provinsi sangat jauh sehingga apabila akan mengurus administrasi sekolah mereka harus membutuhkan waktu yang lebih banyak.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Januari 2020, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh bapak A (Kasi Kurikulum SMA) merasa sedikit kesulitan dalam memanejemen sekolah-sekolah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan di karenakan belum terbentuknya komando satu wilayah atau koordinator wilayah seperti provinsi lainnya, sehingga pihak dinas pendidikan hanya mengandalkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk memanejemen sekolah-sekolah tersebut. Pihak Dinas Pendidikan juga menerima beberapa keluhan dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut, diantaranya faktor jarak tempuh yang harus dilalui untuk menuju lokasi kantor dinas pendidikan yang berada di tengah-tengah kota Palembang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti "Implementasi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. (Studi Kasus di Kabupaten Musi Banyuasin)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimana implementasi pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi. (studi kasus di kabupaten Musi Banyuasin)"?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi. (studi kasus di kabupaten Musi Banyuasin).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi yang membaca, bukan saja bermanfaat bagi peneliti, tetapi juga bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat langsung didalamnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi pemerintah agar dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan selanjutnya, dan mendengarkan keluhan – keluhan dari sekolah – sekolah yang memiliki masalah.

1.4.2.2 Bagi sekolah, semoga dapat menyelesaikan problematika yang ada.

1.4.2.3 Bagi peneliti, agar dapat memperluas wawasan keilmuan dan sumber acuan dapat melakukan penelitian selanjutnya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085
Laman : www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el : support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. 1924/UN9.FKIP/TU.SK/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS INDRALAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018,
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/XI/2019,
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/SK.BUK.KP/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRARA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Saudara
1. Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D.
2. Drs. Emil El Faisal, M.Si.

Berturut-turut sebagai pembimbing I dan pembimbing II skripsi mahasiswa

Nama : Audi Kristanto
Nomor Induk Mahasiswa : 06051281621021
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Dampak Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi (Studi Kasus di Kabupaten Musi Banyuasin)

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 10 Agustus 2021



HARTONO

NIP 196710171993011001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNSRI
2. Wakil Dekan Bidang ADUM FKIP UNSRI
3. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNSRI
4. Koordinator Program Studi PPKn FKIP UNSRI
5. Yang Bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. 2015. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Abdoellah, Awan.Y dan Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anggriani, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anonim. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*. tersedia di : <http://e-journal.uajy.ac.id/972/3/2EA16770.pdf> diakses pada tanggal 11 Februari 2020
- Astawa, I.G.Pantja. 2008. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Chan.Sam.M dan Tuti. T. Sam. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Damayanti, Sela Nova. 2017. *Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. Tersedia di : (<http://repository.unair.ac.id/67673/>). Diakses pada tanggal 2 Maret 2019
- Daryanto. H.M. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Habibi, Fikri. 2017. *Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten*. Serang: Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya. Tersedia di : (<http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/469>). Diakses pada tanggal 2 Maret 2019
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kansil, C.S.T. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kemdikbud. <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/110100> diakses pada tanggal 11 Februari 2020
- Noor, Isran. 2012. *Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI*. Jakarta: Seven Strategic Studies.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta
- Undang – Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yusa, I Gede dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.